MEMBANGUN AGRIBISNIS: SOLUSI MENGURANGI KEMISKINAN, MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETAHANAN NASIONAL

Pidato Pengukuhan Jabatan Profesor/Guru Besar dalam Ilmu
Manajemen Agribisnis Pada Fakultas Pertanian
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Oleh:

PROF.DR.IR.H.SYARIF IMAM HIDAYAT,MM

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA, 7 JANUARI 2011

MEMBANGUNAN AGRIBISNIS: SOLUSI MENGURANGI KEMISKINAN, MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETAHANAN NASIONAL

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Yang kami hormati, dan kami muliakan
Bpk Ketua YKPP, Prof.Dr. M.Bambang Pranowo
Bpk Ketua BP Pendidikan (BP dik) YKPP
Bpk Koordinator Kopertis Wilayah VII
Bpk Rektor PTN/PTS Surabaya dan Jawa Timur
Bpk Rektor UPN "Veteran" Jogjakarta, dan Jakarta
Bpk Rektor UPN "Veteran" Jawa Timur, Dekan FP, Ketua Progdi Agribisnis FP
Para Guru Besar, Senat Universitas, Senat Fakultas, pimpinan Universitas/Fakultas
Para kolega dosen, sahabat-sahabat sejawat, civitas akademika UPNV Jawa Timur
Para undangan, promotor, saudara, famili, sahabat, guru, handai taulan yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan Allah SWT

Mengawali pidato ilmiah ini, saya ingin mengajak kita semua yang hadir untuk bersyukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, hidayah dan taufikNya kita ditaqdirkan dapat bersama-sama hadir di Gedung Giri Loka ini dalam keadaan sehat wal afiyat. Saya sangat yakin haqqul yakin tanpa ijin dan ridho Allah SWT mustahil hajat besar ini dapat terselenggara walaupun saya dan segenap panitia sudah merencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Sholawat dan salam kita haturkan keharibaan Baginda Rasulullah Muhammad SAW, khulafaurrasyidin, tabiin dan

tabiit tabiin, para alim ulama yang telah menunjukkan kita jalan terang menuju ridoNya.

Hadirin yang berbahagia,

Tema pidato atau orasi ilmiah saya adalah **"Membangun Agribisnis: Solusi Mengurangi Kemiskinan, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Nasional"**. Topik ini sengaja saya pilih dalam rangka pidato pengukuhan saya sebagai guru besar bidang ilmu Manajemen Agribisnis, dengan beberapa pertimbangan, antara lain karena masalah agribisnis sudah saya geluti sejak tahun 1994 ketika saya menyelesaikan S2 Magister Manajemen Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor. Hal itu menjadi fokus kegiatan saya dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi seperti memberikan kuliah Manajemen Agribisnis pada mahasiswa program S1 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian (1994-sekarang) dan mahasiswa program S2 Magister Manajemen Agribisnis (1999-sekarang), melakukan penelitian di bidang agribisnis, membimbing mahasiswa program S1 maupun S2 dalam penyelesaian tugas akhirnya (skripsi, tesis) dalam ruang lingkup agribisnis. Demikian juga beberapa pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan baik sebagai nara sumber seminar (akademik, regional, nasional), instruktur pelatihan pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian Kabupaten Sidoarjo, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VIII Kementerian Kehutanan maupun sebagai tenaga ahli/konsultan Bappeda Propinsi Jawa Timur sebagian besar berkaitan dengan dunia agribisnis. Tentu saja faktor lain yang tidak kalah menariknya adalah karena negara kita memiliki sumberdaya hayati dan keaneka ragamannya (biodiversivitas) yang banyak, hal itu menjadi peluang untuk

dikelola secara profesional dan proporsional guna keberlanjutan kelangsungan hidup bangsa menuju tercapainya tujuan nasional mewujudkan masyarakat adil makmur, yakni masyarakat yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Seiring dengan kondisi yang ada, dunia agribisnis Indonesia juga masih dihadapkan dengan serangkaian permasalahan-permasalahan dan kendala yang tidak sedikit, misalnya rendahnya daya saing, kuantitas dan kualitas yang masih jauh dari yang diharapkan baik dari aspek produk maupun dari sisi sumberdaya manusia pelakunya. Kesemuanya itu membutuhkan kontribusi nyata dalam suatu sistem yang saling bersinergi dan kemitraan antara kalangan perguruan tinggi, birokrasi, pihak swasta dan masyarakat luas. Perguruan Tinggi dapat berkontribusi dalam ide, gagasan, penelitian terapan; sedangkan birokrasi dalam regulasi dan instrumen kebijakan dan selanjutnya pihak swasta bidang pendanaan (investasi) kemudian masyarakat luas wujud kontribusinya dapat berupa partisipasi aktif dalam penciptaan iklim yang kondusif.

Hadirin yang terhormat,

Saya akan memulai orasi ini dengan mengetengahkan persoalan kemiskinan kemudian saya akan singgung masalah pembangunan pertanian dalam kaitannya dengan kemiskinan yang nantinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi serta selanjutnya jika kondisi demikian tercipta maka akan memantapkan ketahanan nasional.

I. PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan menjadi tantangan garda depan dunia, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga menjadi permasalahan besar dalam pembangunan pada abad ke 21 ini. Hal ini terbukti dari komitmen dunia internasional yang tertuang dalam *Millenium Development Goals (MDGs)* atau Tujuan Pembangunan Milenium, yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), berupa target bersama dari 180 negara termasuk Indonesia untuk mengurangi separuh jumlah penduduk miskin dunia dalam periode 2000-2015.

Sepanjang sejarah Indonesia sebagai *nation state*, tidak ada persoalan yang lebih besar selain persoalan kemiskinan (Sahdan, 2005). Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, akses ke pelayanan publik sangat jarang diperoleh, sedikitnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota dan yang lebih parah. Kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas. Kemiskinan menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup (*safety life)*, mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi namun keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan (Scott, 1987). Para buruh tani desa bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit; senantiasa hidup dalam kekurangan.

Hasil pendataan angka kemiskinan terkini yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2010 menunjukkan angka yang masih relatif cukup tinggi, walaupun diakui bahwa jumlah penduduk miskin tersebut mengalami penurunan, jika dibandingkan pada periode sebelumnya. Data kemiskinan pada Maret 2010 tercatat 1,51 juta orang (13,33 persen) dibandingkan periode Maret 2009 sebesar 32,53 juta orang. BPS menentukan penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka garis kemiskinan pada Maret 2010 adalah Rp 211.726 per kapita per bulan.

Distribusi penduduk miskin di Indonesia tidak merata, lebih dari 57% penduduk miskin berada di Jawa dan Bali, 21% berada di Pulau Sumatera, dan sisanya tersebar di Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia. Sebaran ini membawa implikasi pada karakteristik kemiskinan yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah.

Konsekuensi lebih jauh adalah pada efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang belum menunjukkan hasil optimal disamping karena masih mendasarkan pada pendekatan tunggal, belum terintegrasi dengan baik, juga seringkali belum secara penuh diupayakan dalam kegiatan yang berkesinambungan. Bertitik tolak dari evaluasi program kegiatan tersebut, maka sebaiknya dalam jangka panjang perlu dipikirkan dan dipertimbangkan cara-cara penanggulangan kemiskinan yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat miskin itu sendiri agar lebih tepat sasaran atau dengan metode menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual.

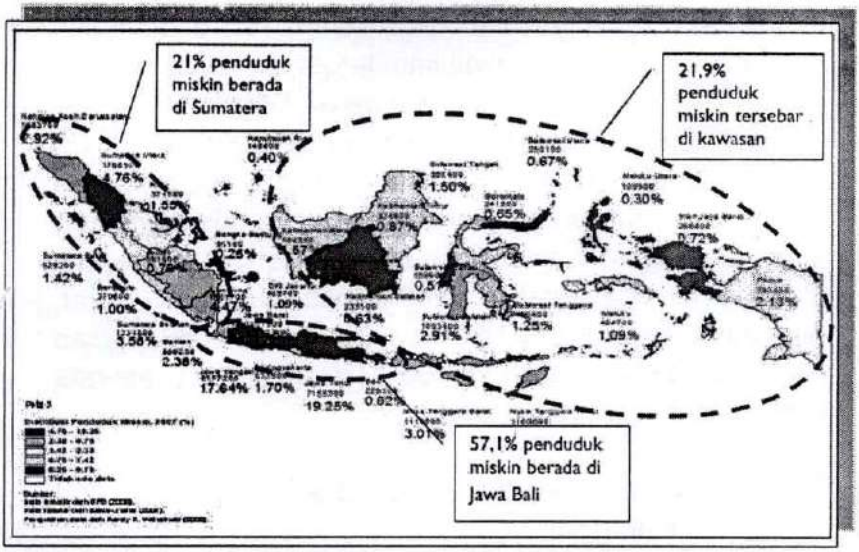

Sumber : Bappenas (2009).

Gambar 1. Sebaran Penduduk Miskin Indonesia

Kemiskinan di Indonesia memiliki karakteristik yang khas. Pertama, sebagian besar penduduk miskin adalah kelompok rentan (*vulnerable poor*) yang sering dikenal juga dengan *transitory poor* yaitu mereka yang tinggal disekitar garis kemiskinan dan sangat terpengaruh dengan faktor eksternal. Kelompok kedua, adalah penduduk miskin kronis (*chronic poor*) yaitu mereka yang berada dibawah garis kemiskinan dan di Indonesia mendominasi kelompok miskin di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran, sangat penting digunakan untuk mengevaluasi kebijakan strategis pemerintah terhadap kemiskinan. Hal

ini juga penting membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisinya. Hasil Sensus Nasional terbaru Badan Pusat Statistik (2010) mencatat sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan kemiskinan yang tinggi. Bahkan, angka kemiskinan yang tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam melimpah, seperti Papua dan Papua Barat. Persentase angka kemiskinan mencapai 34, 88 persen dan 36,80 persen, jauh lebih besar dibandingkan rata-rata nasional sebesar 13,33 persen.

Tabel 1. Data Kemiskinan Pada Beberapa Propinsi Di Indonesia

Propinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi (%)		
No	**Propinsi**	**Angka Kemiskinan**
1	Papua Barat	36,80
2	Papua	34,88
3	Maluku	27,74
4	Sulawesi Barat	23,19
5	Nusa Tenggara Timur	23,03
6	Nusa Tenggara Barat	21,55
7	Aceh	20,98
8	Bangka Belitung	18,94
9	Gorontalo	18,70
10	Sumatera Selatan	18,30

Sumber: Sensus Nasional BPS 2010.

II. MEMAHAMI KEMISKINAN

Kemiskinan adalah konsep abstrak yang dapat dijelaskan secara berbeda tergantung dari pengalaman, perspektif, sudut pandang yang diambil, atau ideologi yang dianut. Cara pandang yang berbeda ini pada gilirannya akan menentukan bagaimana kondisi, sifat dan konteks kemiskinan dapat dipahami, bagaimana sebab-sebab kemiskinan dapat diidentifikasi, dan bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. Agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengelaborasi pengertian kemiskinan secara komprehensif.

Pendekatan dalam memahami kemiskinan telah banyak mengalami kemajuan. Bila semula pengertian kemiskinan hanya ditekankan pada kurangnya pemilikan materi atau ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka kini kemiskinan telah mengalami perluasan arti dengan menyentuh posisi individu dalam proses-proses perubahan sosial ekonomi serta akses dalam politik. Dengan kata lain, kalau pada pendekatan lama, persoalan kemiskinan hanya didekati dari segi deprivasi dalam pendapatan/konsumsi/belanja, maka pendekatan baru menekankan pada *deprivasi* terhadap kemampuan sumberdaya manusia seperti pengetahuan, standar kelayakan hidup, dan lebih menekankan lagi pada *self-reporting, self esteem*, partisipasi, dan pemberdayaan.



Hidayat (2007) melaporkan hasil penelitian fundamental yang dibiayai Ditjen Dikti tentang Studi Kemiskinan Dalam Perspektif Masyarakat Miskin Desa Tertinggal Di Kabupaten Sampang sampai pada kesimpulan bahwa penduduk miskin memiliki persepsi tentang kemiskinan secara absolut, karena mereka merasa miskin disebabkan penghasilannya belum mencukupi guna memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, dan papan. Sedangkan kesehatan dan pendidikan walaupun dirasakan penting tetapi belum dilihat sebagai kebutuhan pokok, dengan demikian ia tidak menjadikan sebagai prioritas dalam mengalokasikan penghasilan-nya untuk kedua kebutuhan tersebut. Ada perbedaan indikator kemiskinan menurut persepsi penduduk pada 3 lokasi desa tertinggal yang berbeda kondisi wilayah sosial ekonominya. Mengetahui persepsi masyarakat tentang kemiskinan pada suatu lokasi akan sangat bermanfaat untuk penanggulangan kemiskinan sesuai spesifikasi lokasi masyarakat setempat.

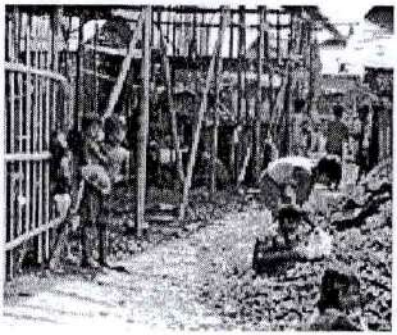

ISSC *(International Social Science Council, 1992)* menyepakati tentang agenda kemiskinan harus didukung oleh *deskripsi fenomenologis* mengenai kondisi kehidupan si miskin dalam konteks sosial budayanya: mengenai harapan

dan cita-citanya, mengenai cara mereka menghadapi kemiskinan dan kemungkinan mereka selamat dan bertindak. Hidayat (2008) mencoba menggali dan membuktikan pernyataan di atas. Melalui penelitian yang dilakukan dengan judul "Kemiskinan Dalam Masyarakat Religius", dilaporkan bahwa dalam masyarakat miskin yang religius, kemiskinan dimaknai sebagai ujian keimanan. Ada dua kategori kemiskinan di dalam masyarakat religius, yaitu orang yang miskin harta, dan ada pula orang yang miskin moral, sehingga bolehjadi dia juga nantinya akan miskin secara sosial. Demikian pula orang kaya memiliki dua kategori. Kaya karena memang banyak hartanya, namun juga ada kaya karena memiliki moral baik, karakter (sifat) terpuji, atau akhlak mulia. Sebagai rekomendasi dari temuan yang ada maka bagi masyarakat miskin yang religius hendaknya program penanggulangan kemiskinan lebih menekankan pada aspek dan sentuhan nilai-nilai agama sehingga program dapat berjalan dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Upaya penyadaran dan pemahaman ajaran dan keyakinan beragama yang benar mutlak diberikan agar sesuai dan selaras antara kehidupan dunia dan akhirat.

Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena adanya pengingkaran hak-hak manusia, karena itu kemiskinan tidak mungkin diatasi tanpa realisasi hak-hak manusia (OHCHR, 2001). Bappenas (2005) dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) juga mendefinisikan masalah kemiskinan dari perspektif ini. Masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk

menjadi miskin. Masalah kemiskinan juga menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin, dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik.

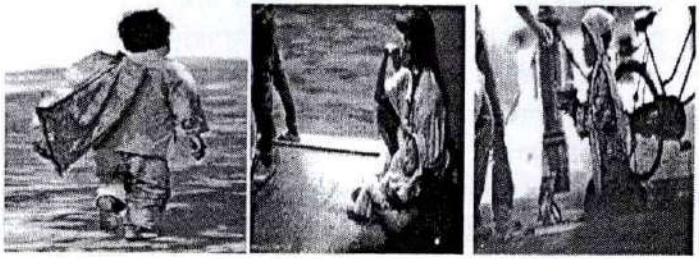

Gambar 2. Beberapa profil kemiskinan yang melanda penduduk Indonesia.

Karakteristik penduduk miskin secara spesifik menurut Pasaribu (2006) adalah: (a) sebagian besar tinggal di perdesaan dengan mata pencaharian dominan berusaha sendiri di sektor pertanian (60 %), (b) sebagian besar (60 %) berpenghasilan rendah dan mengonsumsi energi kurang dari 2.100 kkal/hari, (c) berdasarkan indikator silang proporsi pengeluaran pangan (> 60 %) dan kecukupan gizi (energi < 80 %), proporsi rumah tangga rawan pangan nasional mencapai sekitar 30 %, dan (d) penduduk miskin dengan tingkat sumberdaya manusia yang rendah umumnya tinggal di wilayah marjinal, dukungan infrastruktur terbatas, dan tingkat adopsi teknologi rendah.

Dalam konteks karakteristik kemiskinan masyarakat petani di perdesaan, menarik untuk dikemukakan keterkaitan antara penguasaan lahan dan tingkat kemiskinan. Terdapat korelasi yang kuat antara skala penguasaan lahan dengan indeks kemiskinan dan indeks kesenjangan kemiskinan *(poverty gap)*. Makin luas penguasaan lahan, makin rendah tingkat kemiskinan (LPEM-FEUI, 2004). Bagi tunakisma (petani tanpa lahan), tingkat kemiskinan mendekati 31 %, dan bagi petani dengan penguasaan lahan kurang dari 0,10 ha, tingkat kemiskinan mencapai 28,30 %. Tingkat kemiskinan menurun secara konsisten menjadi 5,60 % bagi rumah tangga petani yang menguasai lahan 2-5 ha.

III. PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN

Pembangunan adalah proses mewujudkan masyarakat sejahtera secara adil dan merata. Masyarakat sejahtera ditandai adanya kemakmuran berupa meningkatnya konsumsi masyarakat karena meningkatnya pendapatan. Peningkatan pendapatan sendiri merupakan hasil produksi yang meningkat. Proses demikian dapat berlangsung baik bila asumsi-asumsi pembangunan, yakni adanya kesempatan kerja secara penuh *(full employment)*, tiap orang memiliki kemampuan yang sama *(equal productivity)*, dan semua pelaku ekonomi bertindak rasional *(efficien)*, terpenuhi (Sumodiningrat, 2007).

Dalam kenyataan, asumsi-asumsi tersebut sangat sulit dipenuhi. Pasar seringkali tak mampu memanfaatkan tenaga kerja dan sumberdaya alam hingga menciptakan kondisi *full employment*, karena tingkat kemampuan dan produktivitas pelaku ekonomi sangat beragam. Kondisi ini diperburuk kenyataan bahwa tidak semua pelaku ekonomi

mendasarkan perilaku pasarnya pada pertimbangan-pertimbangan rasional dan efisien. Dalam kondisi demikian, pasar atau ekonomipun terdistorsi. Dalam jangka panjang, pasar atau ekonomi yang terdistorsi akan melahirkan berbagai masalah pembangunan seperti kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan.

Karena itu, dalam kondisi terdistorsi, pembangunan tidak dapat dibiarkan berlangsung secara alamiah. Pembangunan harus berjalan dengan intervensi pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang akan mendorong terciptanya kondisi yang mendekati asumsi-asumsi tersebut.

Para ekonom klasik dan neoklasik meletakkan pertumbuhan sebagai tema sentral pembangunan, dan meyakini bahwa hanya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi angka kemiskinan dapat dikurangi. Ada dua teori besar yang berkembang pasca Perang Dunia II yakni teori Rostow mengenai tahap-tahap pertumbuhan dan teori Harrod-Domar tentang pertumbuhan ekonomi. Lima tahap teori pertumbuhan Rostow adalah masyarakat tradisional, prakondisi untuk tinggal landas menuju pertumbuhan yang berkesinambungan, tinggal landas, menuju masyarakat dewasa, dan masa konsumsi tinggi. Uraian Rostow mengenai investasi diperdalam Harrod-Domar mengenai pertumbuhan ekonomi. Ia mengemukakan agar tumbuh suatu perekonomian harus memiliki tabungan dan investasi dalam proporsi tertentu terhadap *Groos National Product* (GNP). Makin besar tabungan dan investasi, makin cepat perekonomian tumbuh.

Pada pertengahan tahun 1970-an pendekatan *community development* sangat populer dan menggeser pendekatan pembangunan pada 1960-an, yang lebih digerakkan mitos pertumbuhan. Kemudian pada akhir 1970-

an strategi *basic needs* dianggap sebagai masa lalu solusi masalah pembangunan di perdesaan. Kemudian muncul konsep pembangunan lain, seperti *sustainable development* dan *empowerment.*

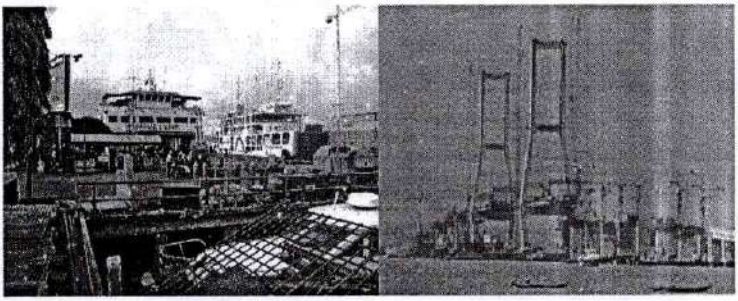

Gambar 2. Pembangunan Sarana Perhubungan Laut perlu terus dibangun untuk memenuhi kebutuhan penduduk di daerah kepulauan.

Tabel 2. Pergeseran Paradigma Pembangunan dalam Penanganan Masalah Kemiskinan.

Paradigma Pembangunan	Asumsi	Pende-katan	Posisi Orang Miskin	Masa Pelaksanaan
Pertumbuhan	Kemiskinan akan dengan sendirinya teratasi jika per-tumbuhan ekonomi terjaga tinggi *(tricle down)*	*Top down*	Dampak samping	Repelita I-II
Pertumbuhan dengan pemerataan	Pertumbuhan tidak cukup. Perlu ada kebijakan distri-butif dan redistributif untuk meningkatkan kesejahtera-an penduduk miskin	*Top down*	Objek	Repelita III – IV
Pemberdayaan Masyarakat	Orang miskin harus diber-dayakan dan dilibatkan da-lam proses pembangunan dan dihargai hak-hak da-sarnya sebagai warga ne-gara (*participatory* dan *emancipatory*)	*Bottom up*	Subjek	Repelita V – VI
Orientasi kemiskinan	Seluruh kegiatan pemba-ngunan ekonomi, sosial, politik, hukum, dan keama-nan harus berorientasi pada penanggulangan ma-salah kemiskinan	*Bottom up dan kolaborat if*	Subjek	Saat ini dan ke depan

Sumber: Darwin (2005)

Jika ditilik ke belakang, yaitu sejak awal pemerintahan Orde Baru hingga sekarang, sulit untuk meletakkan secara jelas posisi yang diambil Indonesia dalam peta pergulatan wacana pembangunan di atas, apakah selama ini pembangunan Indonesia lebih menitikberatkan pada pertumbuhan atau pada pemerataan. Secara umum Pemerintah Orde Baru mengembangkan sistem ekonomi pasar namun pada saat yang sama negara banyak melakukan intervensi melalui perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Mekanisme pasar menjadi metode dalam alokasi barang dan jasa, tetapi harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak dikontrol oleh negara. Pemerintah mengadopsi Teori Lepas Landas Rostow, yang mengawali pembangunan dari pembangunan sektor pertanian dan pemenuhan kebutuhan pokok, bukan dari pengembangan industri berat (Sjahrir, 1986 dalam Darwin, 2005).

Konsep tetesan ke bawah *(tricle down effect)*: "kue dulu dibesarkan, baru dibagi" banyak dipakai sebagai justifikasi dari kebijakan pertumbuhan ketika itu. Bukti-bukti adanya ketimpangan ekonomi yang semakin melebar sebagai akibat dari pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan kemudian dikritik oleh para pengkritik dengan mengatakan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah tetesan ke atas *(trickle up)*, yaitu penyedotan dana lokal ke pusat (Nugroho, 1995). Banyak pula yang memberi kritik bahwa program pemerataan selama Orde Baru hanyalah program lipstik, dan orientasi kepada pertumbuhan dianggap masih lebih menonjol dibandingkan pemerataan, sedangkan faktanya perbedaan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar. Juga terdapat kritik yang mengatakan bahwa kebijakan yang berorientasi kepada pemerataan

cenderung bersifat *top down*, sehingga kurang memberdayakan masyarakat (Dewanta, 1995).

Kini muncul wacana baru yaitu penekanan pada problematika kemiskinan. Disini persoalan penanggulangan kemiskinan tidak hanya diperhatikan dari berjalannya program-program spesifik untuk membantu masyarakat miskin, seperti program padat karya, raskin, subsidi pendidikan dan kesehatan bagi orang miskin, dan sebagainya, tetapi juga dari orientasi seluruh kebijakan pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan secara keseluruhan harus berorientasi pada orang miskin *(pro poor)*. Dalam paradigma ini upaya penanggulangan kemiskinan harus tercermin dalam semua kebijakan baik kebijakan sosial, ekonomi, politik, hukum, atau keamanan.

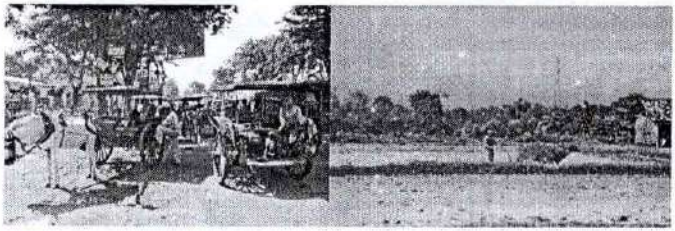

Gambar 3. Kearifan dan potensi lokal perlu disinergikan dengan modernisasi.

IV. PEMBANGUNAN PERTANIAN & KEMISKINAN

Mengangkat kemiskinan menjadi suatu prioritas pembangunan, tampaknya merupakan hal yang sangat tepat. Pembangunan yang tidak dikaitkan dengan kemiskinan akan menimbulkan peluang munculnya permasalahan-permasalahan jangka pendek dan jangka

panjang yang akan membahayakan proses dan keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

Pembangunan pertanian sebagai salah satu dasar bagi pembangunan nasional, rupanya tidak hanya cukup puas menjadi sektor yang berperan tangguh pada persoalan-persoalan pembangunan perekonomian semata. Walau dalam masa krisis ekonomi dan moneter menunjukkan pertumbuhan yang positif diantara sektor-sektor lain yang terus menurun, namun lebih dari itu peran dan fungsi sektor pertanian sebagai *leading sector* perekonomian saat ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan, sejalan dengan perubahan dan tuntutan pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, sekitar 70 persen penduduk Indonesia bermukim di perdesaan. Sebagian besar dari masyarakat perdesaan hidup dari kegiatan pertanian. Akan tetapi penguasaan tanah yang sempit menjadikan masyarakat di perdesaan hidup dalam keterbatasan baik keterbatasan finansial, modal, pengetahuan dan keterampilan, maupun keterbatasan dalam mengakses informasi dan teknologi. Bahkan diantara mereka masih banyak yang tidak memiliki lahan pertanian *(tunakisma)*.Kondisi demikian menyebabkan mereka berada dalam kondisi kemiskinan. Guna mencukupi kebutuhannya masyarakat perdesaan umumnya mencari berbagai sumber mata pencaharian baik dalam bidang jasa sebagai tukang ojek, tenaga kerja borongan, buruh kasar, dan lain-lain.

Susilo Bambang Yudhoyono (kini Presiden RI) dalam laporan disertasinya di IPB Bogor (2004) mengemukakan bahwa dalam struktur perekonomian nasional, sektor pertanian menempati posisi penting dalam kontribusinya terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) riil tahun 2003

dibawah sektor industri. Pada saat krisis, sumbangan sektor pertanian terhadap PDB mengalami peningkatan paling besar dibanding sektor lainnya. Dari segi penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2003 sektor pertanian mampu menyerap sekitar 46 persen, paling tinggi diantara sektor-sektor lain. Dengan demikian sektor pertanian dan perdesaan sesungguhnya merupakan sektor yang strategis dalam pembangunan nasional baik kini maupun masa yang akan datang.

Dengan posisi yang demikian, maka pembangunan pertanian dan perdesaan dapat menjadi suatu strategi yang tepat dalam mendorong upaya untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Melalui strategi ini, upaya mengatasi dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran akan tepat sasaran. Disamping mengintegrasikannya dalam strategi pembangunan nasional, pembangunan pertanian dan perdesaan akan langsung membidik wilayah dimana kemiskinan dan pengangguran itu sebagian besar berada.

Potensinya yang tinggi serta posisinya yang strategis menjadikan sektor pertanian dan perdesaan sebagai prioritas pembangunan, khususnya dalam upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa proses pembangunan yang selama ini bias terhadap industri manufaktur dan perkotaan telah menjadikan pertanian dan perdesaan termarjinalkan. Hal ini lebih lanjut, telah menjadikan masyarakat pertanian dan perdesaan memiliki tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang rendah, ditandai oleh tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Kondisi tersebut disebabkan adanya kecenderungan penurunan kualitas hidup masyarakat perdesaan serta ketidakmampuan institusi ekonomi

menyediakan kesempatan usaha, lapangan kerja, serta pendapatan yang memadai bagi masyarakat perdesaan.

PENDEKATAN AGRIBISNIS: SOLUSI PENANG - GULANGAN KEMISKINAN

World Development Report (WDR) terbaru yang dikeluarkan Bank Dunia menyatakan bahwa investasi pada sektor pertanian merupakan cara terbaik untuk mengentaskan kemiskinan di daerah perdesaan negara-negara berkembang. Jika sektor pertanian dan perdesaan diabaikan, maka dunia akan gagal mencapai target untuk mengurangi setengah penduduk dunia dari tingkat kemiskinan dan kelaparan pada tahun 2015. WDR juga mengisyaratkan bahwa pertumbuhan pertanian masih merupakan cara efektif untuk peningkatan pendapatan petani miskin di perdesaan. Bagi masyarakat termiskin di perdesaan, pertumbuhan PDB yang berasal dari pertanian adalah sekitar empat kali lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan PDB dari luar sektor pertanian.

Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan pertanian berbasis agribisnis dengan agroindustri sebagai salah satu subsistemnya akan merupakan salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan. Sebagai industri berbasis sumberdaya, agroindustri berpotensi dapat meningkatkan cadangan devisa serta penyediaan lapangan kerja. Hal ini dinilai strategis mengingat Indonesia merupakan satu dari sedikit negara di daerah tropis yang memiliki keragaman hayati (*biodiversity)* cukup besar. Untuk sektor perkebunan saja tidak kurang dari 145 komoditas tercatat sebagai komoditas binaan, sementara yang memiliki nilai ekonomis dapat diandalkan baru sekitar 10 persen diantaranya kelapa sawit, karet, kopi, jambu mete (Saragih, 1998).

Selanjutnya pengembangan agroindustri akan sangat strategis apabila dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengertian terpadu adalah keterkaitan usaha sektor hulu dan hilir (*backward and forward linkages)* serta pengintegrasian kedua sektor tersebut secara sinergis dan produktif. Sedangkan dengan konsepsi berkelanjutan, diartikan sebagai pemanfaatan teknologi konservasi sumberdaya dengan melibatkan kelompok/lembaga masyarakat, serta pemerintah pada semua aspek. Dengan demikian diperlukan jaringan kerja dan peran aktif semua pihak yang terkait. Keterpaduan dan berkelanjutan inilah yang menempatkan UMKM yang tergabung dalam sentra-sentra, menjadi variabel penting. Hal ini karena agroindustri, yang memproduksi kebutuhan konsumsi masyarakat memiliki "*multiplier effects*" tinggi karena keterlibatan berbagai komponen dalam masyarakat (Tambunan, 2001). Data yang dikumpulkan Depperindag (2003) menunjukkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam agroindustri, jumlahnya meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2000 tercatat 2.673 perusahaan, dan berkembang menjadi 2.924 perusahaan pada tahun 2004



Gambar 3. Membangun Agribisnis Perlu Keperpaduan Dalam Satu Sistem

Meningkatnya pertumbuhan jumlah agroindustri ternyata berdampak terhadap meningkatnya jumlah tenaga kerja. Total tenaga kerja pada tahun 1999 adalah 735.388 dan tumbuh menjadi 744.777 pada tahun 2003. Jumlah tenaga kerja ini adalah karyawan yang terlibat langsung dalam perusahaan. Jumlahnya akan jauh lebih besar bila memperhitungkan tenaga kerja yang tidak langsung terkait dengan agroindustri, misalnya pedagang pengecer, pemasok, dan tenaga permanen.

Sementara itu, perkembangan kapasitas produksi menunjukkan gambaran bahwa masih banyak kemampuan produk yang bisa dioptimalkan. Data yang ada menunjukkan

bahwa pada semua komoditas, total kapasitas terpasang masih lebih besar dibandingkan dengan produksi riil. Rata-rata utilitas pada tahun 2001 adalah 56.25 % menjadi 14.94 % pada tahun 2004. Dengan demikian terjadi peningkatan produksi, yang lebih banyak dapat memanfaatkan kapasitas terpasang.

Dalam kegiatan ekspor impor, agroindustri juga menunjukkan perkembangan. Dengan menggunakan berat/tonase, maka pada tahun 2000 diekspor 5.442 metrik ton, meningkat menjadi 5.937 metrik ton tahun 2003. Nilainya meningkat dari USD 2.743 juta pada tahun 2000 menjadi USD 3.769 juta pada tahun 2003. Sementara itu, dari sisi impor, ternyata mengalami kenaikan yaitu dari 1.835 metrik ton pada tahun 2000 bernilai USD 696 juta menjadi 3.217 metrik ton senilai USD 1.217 juta pada tahun 2003. Dari sisi investasi dalam agroindustri menunjukkan peningkatan walaupun tidak signifikan, yaitu dari total investasi sebesar Rp 26.729 milyar pada tahun 1999 menjadi 27.850 milyar pada tahun 2003.

Dibalik perkembangan yang ada masih banyak menyisakan permasalahan dalam upaya mengembangkan agroindustri, yakni potensi agroindustri yang sangat besar belum sepenuhnya mampu diwujudkan secara berdayaguna dan berhasil guna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumberdaya permodalan, hambatan teknologi, dan rendahnya efektivitas kelembagaan yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi strategis di atas. Permasalahan tersebut muncul karena adanya beberapa titik lemah dalam kebijakan dan implementasi program pengembangan agroindustri di Indonesia, terutama adalah sebagai berikut:

A. Rendahnya produktivitas dan daya saing. Pada fase awal krisis mutidimensi pada tahun 1998, kegiatan

agroindustri tetap tegar menghadapi krisis di tengah kondisi Industri lain yang *collaps.* Hal ini disebabkan karena agroindustri mengandalkan sumberdaya lokal untuk kebutuhan bahan bakunya sedangkan industri lainnya sangat tergantung pada bahan baku impor dengan lonjakan harga yang naik fantastis. Akan tetapi situasi ini memunculkan masalah baru yaitu rendahnya produktivitas usaha dan disparitas pendapatan antar sektor, sehingga daya saing produk agroindustri khususnya di pasar internasional menurun. Produktivitas sangat terkait dengan aspek penerapan teknologi pengolahan, pengolahan hasil pertanian sebagian besar masih menggunakan teknologi serta peralatan masih sederhana. Pengetahuan dan kesadaran petani sebagai produsen dan juga sebagai salah satu pelaku pasar masih kurang. Rendahnya penggunaan teknologi ini diakibatkan oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia pelaku agroindustri masih rendah dan kurang tersedianya teknologi dan peralatan pengolahan secara merata. Lemahnya pembinaan dan penerapan jaminan mutu mempunyai andil terhadap rendahnya mutu produk yang dihasilkan agroindustri. Rendahnya kesadaran akan produk yang bermutu dan aman, sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya peningkatan mutu hasil pertanian. Belum mampunya produk-produk agroindustri merespon perubahan tuntutan konsumen yang cenderung menyukai produk dengan kualitas tinggi, kontinuitas pasokan, ketepatan waktu penyampaian, serta harga yang kompetitif (Tambunan, 2001).

B. Keterbatasan kapasitas dan kemampuan pelaku agroindustri untuk menghimpun sumberdaya dalam rangka meningkatkan posisi tawarnya. Sebagian besar agroindustri beroperasi dalam skala kecil. Hal ini berarti agroindustri bersifat menyebar, masif, dengan sumberdaya yang tersebar dan terpisah-pisah. Kondisi demikian mempersulit dalam pengorganisasian sumberdaya dalam suatu organisasi yang mampu menghimpun menjadi kekuatan penyalur aspirasi yang dapat disinergikan secara efektif.

C. Lemahnya keterkaitan struktural agroindustri, baik secara internal, maupun dalam hubungannya dengan sektor lain. Pengembangan agroindustri semestinya menjadi pilihan strategis dalam menanggulangi permasalahan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk penanggulangan kemiskinan. Hal ini karena agroindustri mampu menyerap banyak angkatan kerja, mengingat sifat industri pertanian yang padat karya dan bersifat masal. Potensi yang besar dan tersebar tersebut belum dapat dirangkai menjadi suatu keterkaitan yang integratif, baik antar wilayah, antar sektor, dan bahkan antara satu komoditas dengan komoditas lain. Pembangunan pertanian masa lalu dinilai cenderung bias pada padi dan beras. Sebagian besar upaya inovasi dan pembangunan teknologi program pertanian masa lalu difokuskan pada padi dan beras, sehingga inovasi dan pengembangan teknologi bagi pangan lainnya berjalan sangat lamban bahkan tertinggal (Arifin, 2004).

D. Kebijakan makro dan mikro ekonomi yang kurang berpihak kepada agroindustri. Pengembangan agroindustri pada berbagai skala kegiatan perlu didukung adanya kebijakan makro dan mikro yang dapat menciptakan usaha yang kondusif, dan semakin memudahkan pelaku agroindustri dalam mengakses ke sumberdaya produktif. Selama ini pembangunan pertanian cenderung bias ke masyarakat perkotaan, menguntungkan penduduk kota, dan nilai tambahnya lebih banyak dinikmati penduduk kota (Arifin, 2004). Perhatian pada kepentingan non pertanian khususnya sektor industri dan manufaktur (ketika pangan dan pertanian menjadi residual) jauh lebih besar daripada pemenuhan kebutuhan pangan penduduk serta kesejahteraan petani. Akibatnya potensi produksi agroindustri belum dikelola secara optimal sehingga produktivitas agroindustri kurang berkembang. Perubahan preferensi konsumen yang makin menuntut atribut produk yang lebih rinci dan lengkap serta adanya preferensi konsumen akan produk olahan, maka motor penggerak sektor pertanian berubah dari usahatani kepada agroindustri. Keadaan ini mengharuskan adanya kebijakan makro dan mikro yang berpihak kepada agroindustri.

PELUANG PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI

Kendatipun terdapat hal-hal yang merupakan penghambat terhadap pertumbuhan agroindustri, namun sektor ini masih memiliki peluang untuk berkembang secara meyakinkan terutama bila dikelola secara arif dan bijaksana. Peluang tersebut adalah:

a. Jumlah penduduk Indonesia yang kini berjumlah lebih 235 juta jiwa merupakan aset nasional dan sekaligus berpotensi menjadi konsumen produk agroindustri. Tingkat pendapatan masyarakat yang semakin meningkat merupakan kekuatan yang secara efektif akan meningkatkan permintaan produk pangan olahan.
b. Berlangsungnya era perdagangan bebas berskala internasional, telah semakin membuka kesempatan untuk mengembangkan pemasaran produk agroindustri.
c. Penyelenggaraan otonomi daerah memberikan harapan baru akan munculnya prakarsa dan swakarsa daerah untuk menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan program dan aspirasi wilayah yang spesifik dan berdaya saing. Peningkatan kinerja pemerintah daerah, bila dibarengi dengan stabilitas politik merupakan faktor penting yang akan menarik para investor untuk mengembangkan agroindustri.
d. Dari sisi suplai sumberdaya, agroindustri masih memiliki bahan baku yang beragam, berlimpah dalam jumlah besar dan tersebar di seluruh penjuru tanah air.
e. Dalam proses produksinya, bahan baku agroindustri tidak bergantung pada komponen impor. Sementara pada sisi hilir, produk agroindustri umumnya berorientasi pada ekspor.

PEMBANGUNAN PERTANIAN BASIS PERTUMBUHAN EKONOMI

Ditinjau dari struktur perekonomian nasional, sektor pertanian menempati posisi yang penting dalam kontribusinya terhadap PDB. Pada saat krisis, sumbangan sektor pertanian terhadap PDB mengalami peningkatan paling besar dibanding sektor lainnya. Dari segi penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2003 sektor pertanian mampu menyerap sekitar 46 persen, paling tinggi diantara sektor-sektor lain (Yudhoyono, 2004).

Pertumbuhan ekonomi ada dua bentuk: *extensively*, yaitu dengan penggunaan banyak sumberdaya (seperti fisik, manusia atau *natural capital*) atau *intensively*, yaitu dengan penggunaan sejumlah sumberdaya yang lebih efisien (lebih produktif). Ketika pertumbuhan ekonomi dicapai dengan menggunakan banyak tenaga kerja, hal tersebut tidak menghasilkan pertumbuhan pendapatan per kapita. Namun ketika pertumbuhan ekonomi dicapai melalui penggunaan sumberdaya yang lebih produktif, termasuk tenaga kerja, hal tersebut menghasilkan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan meningkatkan standar hidup rata-rata masyarakat.

Suatu strategi pertumbuhan ekonomi yang dimotori oleh sektor pertanian dan lapangan kerja menurut Meier (1989) mempunyai tiga unsur. *Pertama,* laju pertumbuhan pertanian harus dipercepat meskipun luas tanah yang tersedia tetap. Dengan perubahan teknologi dalam pertanian maka masalah tersebut akan dapat diatasi. *Kedua,* permintaan domestik hasil pertanian harus tumbuh cepat meskipun permintaan itu tidak elastis. *Ketiga,* permintaan barang dan jasa yang ditimbulkan oleh proses-proses padat modal yang masih rendah harus dinaikkan. Ketiga unsur

dimaksud secara terus menerus akan saling berinteraksi dan bersinergi sehingga strategi pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pertanian akan mencapai tujuan dan sasarannya.

Belajar dari pengalaman masa lalu, pendekatan pembangunan pertanian dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dapat ditempuh melalui pendayagunaan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dengan merancang pembangunan pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri dan sistem agribisnis dimana pertanian, industri hulu pertanian, industri hilir pertanian serta sektor yang menyediakan jasa yang diperlukan, dikembangkan secara simultan dan harmonis.

Dengan perkataan lain, dengan menempatkan pembangunan pertanian sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi nasional *(agricultural led development)* maka persoalan ekonomi Indonesia saat ini seperti pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan devisa, pemerataan, percepatan pembangunan ekonomi daerah, membangun ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan hidup, akan dapat dipecahkan sekaligus dan berkelanjutan.

Kedepan pembangunan pertanian tidak cukup hanya melalui dorongan pemerintah dalam upaya peningkatan produksi, pembukaan lahan pertanian, tetapi lebih ke arah pembangunan yang hasilnya tidak dapat dirasakan pada waktu singkat yaitu perubahan perilaku (sikap mental dan budaya masyarakat pertanian) dalam berusahatani.

Kiranya masih relevan apa yang disarankan oleh Mosher yang mengingatkan tentang perlunya penguasaan teknologi baru (Mosher, 1976). Pembangunan pertanian

tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi baru mengingat dinamika perubahan preferensi konsumen produk pertanian yang cepat berubah. Bahkan saat itu Mosher mengingatkan untuk memperhatikan lima faktor pokok yang senantiasa perlu dipenuhi, yaitu: adanya pasar produk pertanian, adanya teknologi yang selalu berubah yang dikuasai petani, adanya atau tersedia sarana produksi secara lokal, adanya insentif produksi bagi petani, dan adanya transportasi yang memadai.

V. KEMISKINAN DAN KETAHANAN NASIONAL

Bangsa Indonesia, berdasarkan pengalamannya, telah menetapkan satu cara untuk mengatasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Cara itu adalah *Ketahanan Nasional* . Yang kita maksudkan dengan Ketahanan Nasional adalah *kondisi dinamis bangsa berisikan keuletan dan ketangguhan yang membentuk kekuatan nasional* yang dapat mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa serta pencapaian tujuan nasional.

Ketahanan Nasional mempunyai aspek utama, yaitu *Kesejahteraan dan Keamanan.* Kesejahteraan dan Keamanan adalah dua aspek dari Ketahanan Nasional yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang. Oleh sebab itu maka, mengusahakan terwujudnya Ketahanan Nasional pada hakikatnya merupakan satu proses membentuk Kesejahteraan dan Keamanan buat negara dan bangsa. Ada kalanya bangsa berada dalam tingkat perjuangan yang memerlukan titik berat pada Kesejahteraan, sedangkan pada tingkat

perjuangan lain mungkin juga titik berat harus pada Keamanan. Namun sekalipun titik berat diletakkan pada salah satu aspek, aspek yang lain tidak boleh hilang sama sekali. Sebab seperti dalam ilmu hitung apabila angka satu dikalikan dengan nol, hasilnya menjadi nol pula. Jadi kalau salah satu aspek sama sekali tidak diperhatikan, Ketahanan Nasional akan sama dengan nol atau tidak ada Ketahanan Nasional. Paling baik dan ideal adalah kalau dapat membentuk kondisi harmonis antara Kesejahteraan dan Keamanan, meskipun hal itu tidak mudah tercapai.

Ketahanan Nasional hanya dapat terwujud kalau seluruh segi kehidupan bangsa yang biasa dinamakan aspek sosial kehidupan, meliputi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hankam. Juga meliputi aspek alam , yaitu Geografi, Penduduk dan Kekayaan Alam dapat dimplementasikan serasi selaras dalam program kegiatan nyata. Di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional seluruh segi kehidupan bangsa itu dinamakan *Asta Gatra,* terdiri dari *Panca Gatra (Sosial)* dan *Tri Gatra (Alamiah)*. Seluruhnya itu harus selalu diusahakan untuk memberikan perannya dalam perwujudan Kesejahteraan dan Keamanan.

KEMISKINAN MELEMAHKAN KETAHANAN NASIONAL

Kondisi penduduk yang miskin tidak mendukung adanya Ketahanan Nasional yang kuat, malahan melemahkannya. Kalau masih banyak penduduk Indonesia yang miskin, sekalipun ada kecenderungan akan membaik, maka Kesejahteraan pada waktu ini belum tinggi, sehingga Keamanan belum dalam kondisi yang cukup baik. Oleh karena itu Kemiskinan merupakan tantangan yang harus dapat diatasi secepat mungkin untuk dapat mewujudkan Ketahanan Nasional yang tangguh.

Keluarga adalah unit terkecil terbentuknya suatu bangsa yang tangguh dan tahan terhadap segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Profil keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera akan berkontribusi pada Ketahanan Nasional yang semakin tangguh dan mantap. Keluarga yang berada dalam kondisi miskin tentu saja akan berdampak pada fisik dan non fisik keluarga tersebut, yang pada gilirannya kerawanan dan kerentanan akan senantiasa menghinggapi kehidupan keluarga tersebut. Keluarga itu secara material kurang dapat menyediakan makanan yang cukup, apalagi yang sehat dan cukup bergizi. Buat mereka yang penting adalah makan sekedar mengisi perut agar tidak terlalu keroncongan. Akibat dari kurang makan makanan bergizi, kesehatan menjadi rawan, kurang kekuatan untuk bekerja karena suplai energi yang masuk ke tubuh kurang akibatnya kemampuan berpikir menjadi lemah disebabkan otak kurang bekerja secara maksimal. Bolehjadi jikalau ada anggota keluarga yang masih sekolah, maka mereka akan sukar untuk belajar dengan baik. Manakala sudah bekerja, maka produktivitas yang tinggi sulit diperoleh. Kondisi demikian akan mudah terserang penyakit yang membuat kehidupan makin sengsara karena kurang mampu membeli obat. Dengan demikian usia harapan hidup menjadi tidak terlalu panjang.

Secara umum kondisi fisik seseorang akan sangat mempengaruhi kondisi mentalnya, demikian juga sebaliknya. Jadi kalau keadaan materialnya miskin, akan mempengaruhi kondisi mentalnya. Orang itu menjadi acuh tak acuh dan tidak mempunyai perhatian terhadap hal-hal di luar masalah kehidupannya secara langsung. Mereka menjadi mudah dipengaruhi oleh pihak lain yang dapat memberikan sesuatu kepadanya dan akibatnya ia kurang

mempunyai pendirian sendiri. Kemauan dan keuletan mentalnya lemah dan mudah menyerah terhadap kesulitan. Tidak mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan kekuatan. Tidak ada keinginan untuk mengubah kehidupannya sehingga dapat keluar dari kemiskinan. Kalau mempunyai satu pekerjaan , sama sekali tidak ada niat untuk menghasilkan pekerjaan yang bermutu tinggi. Jadi tidak ada padanya pengertian efisiensi dan efektivitas, melainkan asal jadi. Atau orang itu menjadi a-sosial dan melawan masyarakat. Wujud perbuatannya akan mengarah kepada tindakan kriminal untuk membalas keburukan kehidupan yang harus ia alami, seakan-akan masyarakatlah yang menjadi sebab kondisinya yang buruk itu. Maka tidak jarang kita jumpai dalam masyarakat yang miskin, akan dijumpai tingkat kriminalitas yang tinggi. Makin buruk kondisi materialnya makin lemah pula kondisi mentalnya.

Keadaan demikian jelas sekali tidak menunjang Ketahanan Nasional, sebab Ketahanan Nasional akan terwujud dalam kondisi dinamis satu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan. Sedangkan kemiskinan menghasilkan masyarakat yang sikapnya acuh tak acuh, kalau bekerja asal jadi saja, di sekolah tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk belajar guna meraih prestasi tinggi. Biasanya masyarakat demikian rawan terhadap berbagai pengaruh negatif dari pihak lain yang mampu memberikan sesuatu yang menggiurkan untuk dinikmati sesaat dengan segala cara (pragmatis). Tidak mustahil juga akan terjadi tindakan kriminalitas, konflik sosial dan lain sebagainya termasuk masalah patologi sosial, dimana hal itu akan melemahkan Ketahanan Nasional.

Apabila dilihat dalam perspektif hubungan antara negara dan warga negara , maka kemiskinan mengakibatkan banyak hal yang kurang menunjang Ketahanan Nasional yang tangguh. Salah satu alasan yang dapat dikemukakan adalah bahwa kondisi penduduk yang tergolong miskin, maka pemerintah tidak dapat memungut atau melakukan penarikan pajak yang luas (Sayidiman, 1995). Akibatnya adalah bahwa penerimaan pemerintah relatif rendah apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang begitu banyak. Karena keuangan pemerintah tidak banyak, maka berbagai usaha yang harus dibiayai pemerintah juga terbatas sifatnya. Hal itu bisa kita lihat dalam penyusunan TNI yang seharusnya merupakan satu kekuatan hankam yang seimbang di darat, laut dan udara, mengingat kondisi geografis Indonesia. Akan tetapi karena membangun Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang besar cukup mahal, demikian pula untuk membentuk kekuatan militer darat yang modern dan mobil, maka yang ada hanyalah kekuatan territorial yang besar. Sedangkan Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Darat yang mobil amat terbatas kekuatannya. Juga belum dapat disusun kemampuan Kepolisian yang sesuai dengan tuntutan meningkatnya kriminalitas. Penyelenggaraan pendidikan nasional amat dirintangi oleh kondisi guru yang kurang bermutu, karena pemerintah belum dapat mengadakan pendidikan guru yang bermutu dan juga belum dapat memberikan kehidupan guru yang memadai dengan gaji yang wajar. Pemerintah juga belum dapat menggaji pegawai sipil dan anggota TNI sesuai dengan mereka yang bekerja di dunia swasta, karena keuangan pemerintah terbatas. Jadi banyak sekali yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk membuat negara kita kuat, belum dapat

dilakukan karena penerimaan pemerintah memang sangat terbatas. Sedangkan penerimaan terbatas itu terutama disebabkan oleh kemiskinan yang masih luas. Dengan fungsi pemerintah yang menghadapi berbagai keterbatasan itu tidak mungkin dihasilkan Kesejahteraan dan Keamanan yang bermutu. Berarti Ketahanan Nasional pun tidak tinggi .

Maka kita melihat bahwa sebagai akibat kemiskinan , Ketahanan Nasional Indonesia masih belum sekuat yang kita inginkan. Memang dalam masyarakat kita ada orang-orang yang kuat karakternya dan menunjukkan keuletan serta ketangguhan yang tinggi. Mereka tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi kemiskinan yang meliputi masyarakat. Akan tetapi itu tidak cukup untuk membuat Ketahanan Nasional tinggi, karena mayoritas penduduk belum demikian gambarannya. Oleh sebab itu untuk kepentingan Ketahanan Nasional harus ada usaha mengatasi kemiskinan, baik dalam arti absolut maupun relatif. Kesejahteraan nasional harus tinggi dan dengan begitu memungkinkan pula menciptakan Keamanan yang tinggi pula.

Dilihat dari sudut Ketahanan Nasional diperlukan sekali terwujudnya lapisan pengusaha kecil dan menengah yang besar jumlahnya dan tinggi mutunya. Tidak cukup satu negara hanya mempunyai lapisan pengusaha besar yang kuat. Sebab lapisan pengusaha kecil dan menengah justru merupakan inti kekuatan ekonomi satu bangsa dan bukan pengusaha besar. Terbukti dari pengalaman bangsa lain yang sudah maju ekonominya, bahwa pengusaha kecil dan menengah menciptakan kesempatan kerja jauh lebih banyak ketimbang usaha besar. Buat Indonesia yang setiap tahun harus menampung angkatan kerja baru sekitar 2 juta orang, penciptaan kesempatan kerja itu amat penting. Selain itu

kegiatan tersebut terkesan setengah hati dan tidak berkesinambungan. Terganggunya sistem pengadaan benih, pupuk, maupun sarana produksi lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan program pertanian pada suatu daerah kabupaten/kota, atau wilayah propinsi.

Ketahanan nasional tidak hanya faktor internal namun juga akan sangat tergantung dari faktor eksternal. Impor beberapa komoditas dari luar negeri, akan berpengaruh pada kondisi pertanian dalam negeri. Era globalisasi melalui terbentuknya kesepakatan-kesepakatan perdagangan bebas secara regional maupun internasional memaksa Indonesia untuk mengikuti aturan yang ada mengingat Indonesia juga termasuk negara yang menandatangani komitmen internasional tersebut. Kesejahteraan penduduk menjadi syarat mutlak terciptanya ketahanan nasional, untuk itu maka melalui program revitalisasi pertanian diharapkan adanya peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan produksi, kualitas produk dan pelaksanaan cara-cara pengelolaan yang lebih efisien dan efektif.

Kaitan pembangunan pertanian dengan ketahanan nasional kini dan ke depan semakin jelas dan relevan setelah dunia dikejutkan dengan melonjaknya harga berbagai komoditas pangan secara cepat dan drastis, yang pada gilirannya telah menimbulkan berbagai persoalan ekonomi, sosial dan politik di berbagai negara. Dampak dari kenaikan harga bahan pangan bisa dan telah menjatuhkan rezim yang berkuasa, seperti yang terjadi di Haiti, memicu kerusuhan sosial seperti di Mesir, Senegal, Bangladesh dan Filipina. Suatu kenyataan yang tak terelakkan bahwa setiap negara di dunia tidak dapat menghindar dari globalisasi yang telah berlangsung sejak akhir abad ke-20 yang lalu.

Dalam era baru tersebut yang ditandai dengan semakin menguatnya paham liberalisasi ekonomi yang hampir merambah seantero dunia ini telah mendorong setiap negara. Mau tidak mau, setuju atau tidak setuju masuk dalam pertarungan yang menitikberatkan pada "kekuatan pasar". Walaupun pada kenyataannya di negara- negara berkembang masih ada kehendak untuk mempertahankan "kekuatan rakyat" dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya (Wiranto, 2009).

VI. PENUTUP

1. Persoalan kemiskinan adalah problematika bangsa Indonesia yang sangat kompleks, multidimensi baik faktor penyebabnya, kriteria dan cara mengukurnya, hingga metode penanggulangannya.
2. Berbagai upaya mengatasi kemiskinan sejak dulu telah dilaksanakan, namun hasilnya belum menunjukkan hal yang positif dan signifikan, salah satu penyebabnya karena upaya tersebut tidak berkesinambungan, belum terintegrasi antar institusi/lembaga dan lebih menekankan pada keseragaman program daripada melihat dan memperhatikan apa sesungguhnya yang dibutuhkan warga miskin itu sendiri sebagai subjek sesuai spesifik lokalita. Kedepan, cara-cara dan metode penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pada masyarakat miskin agar mereka memiliki keberdayaan patut menjadi pertimbangan utama para pengambil kebijakan untuk mengangkat harkat dan martabatnya ke arah kehidupan yang lebih layak.

3. Fenomena kemiskinan di Indonesia banyak dijumpai di daerah perdesaan daripada daerah perkotaan, dimana sebagian besar dari mereka adalah golongan petani, peternak, pekebun, nelayan dan lain sebagainya. Tipe kemiskinan yang mereka alami beragam bisa karena sumberdaya alam (kemiskinan absolut) atau bolehjadi karena lingkungan atau sistem yang membuat mereka menjadi miskin (kemiskinan struktural), bahkan Hidayat (2007) membuktikan bahwa didalam masyarakat religius terdapat orang miskin moral, miskin sosial walaupun mereka kaya materi, di sisi lain ada orang yang kaya moral (kaya hati) namun miskin secara materi.
4. Membangun agribisnis adalah solusi mengatasi kemiskinan, karena orientasi agribisnis adalah mengedepankan keadilan bagi semua pelaku, peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan bagi semua pemangku kepentingan. Disamping itu pendekatan agribisnis adalah pendekatan pembangunan pertanian yang bernuansa kesisteman, keterpaduan (integrasi horisontal-vertikal), *backward-forward linkage,* kelestarian lingkungan, dan menitikberatkan pada pembangunan wilayah terutama perdesaan (agroindustri perdesaan) sehingga pendapatan daerah dapat dimaksimalkan. Kegiatan agribisnis tidak pernah lekang oleh waktu, kapanpun dimanapun agribisnis akan tetap eksis dan dibutuhkan masyarakat.
5. Agribisnis adalah komponen utama dan strategis dalam peningkatan PDB, penentu pengurangan kemiskinan, dan angka pengangguran. Bahkan ketika krisis ekonomi melanda bangsa Indonesia, bisnis di

bidang pertanian dalam arti luas tetap bertahan bahkan menjadi katup penyelamat perekonomian bangsa yang sedang terpuruk. Agroindustri di masa depan seharusnya tetap menjadi tumpuan pembangunan nasional terutama dalam upaya meningkatkan investor asing menanamkan investasinya di Indonesia. Rasionalitas pilihan kebijakan semacam itu sesuai kondisi potensi yang ada. Faktor-faktor di atas akan berpengaruh secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

6. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, diharapkan tingkat kesejahteraan penduduk akan meningkat pula, sehingga ketahanan bidang ekonomi menjadi kuat, pengaruh selanjutnya diharapkan ketahanan nasional akan semakin mantap. Pembangunan agribisnis di masa lampau telah membuktikan bangsa ini memiliki ketahanan pangan dengan prestasi yang dicapai yakni swasembada beras. Begitu pula kita harapkan komoditas agribisnis bernilai tinggi spesifik iklim tropis (Indonesia) dapat berkembang dan memiliki daya saing dengan produk-produk komoditas luar. Untuk itu maka kedepan membangun agribisnis menjadi pilihan strategi yang tepat untuk mengurangi kemiskinan, dengan senantiasa terus menerus mengupayakan produk dengan keunggulan komparatif menjadi produk dengan keunggulan kompetitif sehingga ekonomi akan tumbuh dengan perkataan lain tercipta ketahanan di bidang ekonomi. Kalau kondisi demikian terwujud, maka pada akhirnya ketahanan nasional pada berbagai aspek kehidupan nasional akan semakin kokoh, tangguh, dan mantap.

UNGKAPAN RASA SYUKUR DAN TERIMA KASIH

Para Hadirin yang saya muliakan,

Akhirnya, Ijinkan dan perkenankanlah pada kesempatan yang sangat bersejarah dalam kehidupan ini, saya menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan limpahan rahmat dan karuniaNya yang dilimpahkan kepada saya, sehingga dapat memperoleh anugerah jenjang akademik tertinggi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan Guru Besar dalam Ilmu Manajemen Agribisnis pada Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Jawa Timur, TMT 1 September 2010
2. Koordinator Kopertis Wilayah VII, yang telah memproses usulan jabatan akademik Guru besar hingga terbitnya Surat Keputusan Mendiknas.
3. Rektor UPN "Veteran" Jawa Timur selaku Ketua Senat, segenap anggota Senat, khususnya para Dewan Guru Besar, juga jajaran pimpinan dan staf UPN
4. Dekan Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Jawa Timur, Dr.Ir.Ramdan Hidayat,MS selaku Ketua Senat, para anggota Senat Fakultas, jajaran pimpinan dan staf FP khususnya mantan Dekan Fakultas Pertanian Ir.H.Cholid Ridho, MS.
5. Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Ir.Indra Tjahaja Amir TM,MP

Sekretaris Progdi, Ir.Sri Widayanti, MP; dan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Fakultas Pertanian

6. Para Teman Sejawat di lingkungan Program Studi Agribisnis, dan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian, atas segala kerjasamanya yang baik, harmonis dan saling mendukung selama ini
7. Semua Guru saya mulai dari Taman Kanak-kanak Budi Utomo, Sekolah Dasar Negeri Karembangan I, Madrasah Ibtidaiyah Darus salam, (Ust. KH.Moh.Loewi, Ust. KH. Habib Idrus Al Jufri), SMP Negeri, SMA Negeri Sumenep. Dan secara khusus untuk Guru saya Al Mukarram Syaikhona Al Arif Billah Al Habib Muhsin Bin Ali Al Hinduan semoga saya dapat istiqomah dalam beribadah.
8. Semua dosen saya di Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Jawa Timur, dosen di Magister Manajemen Agribisnis Program Pascasarjana IPB Bogor (khususnya Prof.Dr.Ir.H Sjafri Mangkuprawira dan Ir.Wahyudi, M.Ec (alm)), dosen di Program Pascasarjana PDIP (Program Doktor Ilmu Pertanian) Universitas Brawijaya Malang (khususnya Promotor saya Prof.Dr.Ir.H.Sugiyanto,MS; KoPromotor Prof.Dr.Ir.H. Sanggar Kanto, MS; KoPromotor Prof.Dr.Ir.H.Kliwon Hidayat,MS).
9. Penghargaan yang sangat tinggi, rasa terima kasih yang sangat mendalam disertai rasa hormat saya haturkan kehadapan ayahanda Alm. Haji Raden Panji Abdur Rasyid, ibunda Hajjah

Raden Ayu Munira, yang telah melahirkan, membesarkan, menuntun, mendidik, dan mendoakan saya setiap saat sehingga pada hari ini saya mencapai puncak jabatan akademik tertinggi Guru Besar. Semoga Allah mengampuni dosa ayahanda, menerima amal sholeh bagi keduanya dan mudah-mudahan saya dapat mencontohnya dalam kesahajaan, kesederhanaan hidup dan keistiqomahan dalam beribadah terutama sholat.

10. Ungkapan rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada bapak/ibu mertua Alm. Letkol Laut (Purn) H. Soetijono Soemodihardjo, kakak kandung saya Almh. Hj. R.A. Marlia Isminarti, Almh. Hj. R.A.Nur Innafiah, SE, juga pamanda-bulik, kakak ipar, kakak misan, dan seluruh keluarga. Secara khusus saya ingin haturkan kepada pamanda Alm. RH.Moh.Soejoeti yang telah banyak memberikan arahan dan kepeduliannya di bidang pendidikan kepada seluruh keluarga.
11. Kepada isteri saya tercinta, Dra.Hj. Lita Joerinawati dan ketiga anak saya, Wardatunnisa Firdaus Azizah (Smt I FE-Ak), Fahmi Haidar Hidayat (Kls IX SMPN 22 Sby), Abdillah Muhammad Naqsyabandi (4 Th) yang penuh pengertian dan kesabaran, pengorbanan, kasih sayang dan doa yang telah dipanjatkan kepada Allah SWT hingga saya dapat meraih jabatan Jabatan/Profesor.

12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, teman-teman SD, SMP, SMA, Program S1, S2, S3, para mahasiswa saya, maupun alumni Menwa. para tetangga, ta'mir masjid, dan Jamaah Majelis Ta'lim At Taubah.

Mengakhiri pidato ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan meluangkan waktu dan dengan sabar mengikuti prosesi Pengukuhan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian. Amin Ya Rabbal Alamin.

Jazakumullah khairan katsira
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pendahuluan Bela Negara (Tar PPBN) di Pusdiklat Dephankam.

5. Penghargaan dan Tabanas dari Rektor UPNV Jatim, sebagai lulusan Doktor bidang Ilmu Pertanian Universitas Brawijaya Malang tepat waktu 3 tahun, predikat CUMLAUDE, IPK=3,97.
6. Prestasi lain adalah:
   (a) Peserta terbaik II Latprajab Gol III Dephankam 1989
   (b) Peserta terbaik (the best ten) Tar P4 Pola 120 jam, 1990
   (c) Peserta terbaik I (TOT) Penatar P4 Kotamadya Surabaya,'97
   (d) Alumni Resimen Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur

16. Artikel: "Kemiskinan Dan Generasi Muda: Meretas Sekolah Menuju Gerbang Pekerjaan" pada Majalah Api Pembangunan No.28 Th.XXII: Juli-Desember 2008.
17. Artikel: "Profesi Sosok Guru Dalam Perspektif Islam. Majalah Api Pembangunan No.29 Th.XXIII, Januari-Juni 2009
18. Artikel: "Ikhtiar Dan Keadilan Allah SWT". Majalah Api Pembangunan No.30 Th XXIV Juli-Desember 2009
19. Artikel: "Era Kebangkitan Penyuluhan Wujud Revitalisasi Pertanian". Majalah Api Pembangunan No.30 Th XXIV Juli-Desember 2009
20. Artikel: "Merefleksikan Nilai Esensi Ibadah Haji Ke dalam Amaliyah Realitas Kehidupan". Majalah Api Pembangunan No.31 Th.XXIV Januari-Juli 2010
21. Artikel: "Etika Bisnis Islami. Majalah Api Pembangunan No.32 Th.XXIV: Juli- Desember 2010.

PENGHARGAAN:

1. Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia.
2. Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia.
3. Piagam Penghargaan dari Rektor Universitas Brawijaya Malang, sebagai lulusan Doktor dengan predikat **CUMLAUDE** pada Program Doktor Ilmu Pertanian (Sosped) – Program Pascasarjana Strata 3 (Dr) masa studi 3 tahun, IPK = 3,97.
4. Penghargaan dan Tabanas dari Rektor UPNV Jatim, sebagai peserta terbaik II Penataran Pendidikan

5. Kemiskinan Dalam Masyarakat Religius. 2008 Buku (ISBN).
6. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Dan Implementasinya. 2009 Buku (ISBN).
7. Artikel: "Agribisnis Indonesia: Antara Optimisme Dan Kenyataan" pada Majalah Api Pembangunan No.19 Th.XII: Januari-Juni 2004.
8. Artikel: "Ketahanan Pangan Dan Ketahanan Nasional" pada Majalah Api Pembangunan No.20 Th.XIII: Juli-Desember 2004.
9. Artikel: "Sosiologi Pertanian = Sosiologi Pedesaan". Majalah Api Pembangunan No.22 Th.XIII: Juli-Desember 2005.
10. Artikel: "Revitalisasi Pertanian Di Era Otonomi Daerah" pada Majalah Api Pembangunan No.23 Th.XIX: Januari-Juni 2006.
11. Artikel: "Kemiskinan Dalam Perspektif Ketahanan Nasional" pada Majalah Api Pembangunan No.24 Th.XX: Januari-Juni 2006.
12. Artikel: "Pembangunan Perkotaan Berbasis Lingkungan Hidup Menuju Terciptanya "Green City". Majalah Api Pembangunan No.25 Th.XXI: Januari-Juni 2007.
13. Artikel: "Penelitian Kuantitatif versus Penelitian Kualitatif" pada Majalah Api Pembangunan No. 26 Th. XXI: Juli-Desember 2007.
14. Artikel: "KPK versus KPK" pada Majalah Api Pembangunan No.27 Th.XXII: Januari-Juni 2008.
15. Artikel/Renungan: "Hakikat, Arti Dan Makna Kehidupan" pada Majalah Api Pembangunan No.28 Th XXII Juli-Desember 2008.

17. Instruktur Pelatihan Diversifikasi Pertanian, Dinas Pertanian Kab Sidoarjo, 4-11 Agustus 2009
18. Tenaga Ahli/Konsultan Bidang Ekonomi Bappeda Propinsi Jawa Timur 2009-sekr
19. Instruktur Pelatihan Merancang Usaha Dan Peningkatan Jiwa Kewirausahaan Bagi Masyarakat Miskin Desa Kamoning, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, 30-31 Oktober 2010 (DP2M Dikti, 2010)
20. Memperoleh hibah DP2M Dikti dalam iBM (Ketua Tim Pengusul iBM-penerapan Ipteks bagi masyarakat) Judul: Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pelatihan Merancang Usaha Dan Peningkatan Jiwa Kewirausahaan. Skim iBM Batch II 2010.
21. Dosen Tamu pada Acara Kuliah Umum untuk mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja, Sumenep, Judul: :"Agribisnis: Peluang dan Tantangannya di Era Global" di Universitas Wiraraja Sumenep. 11 Desember 2010

KARYA TULIS:

1. Pangan Dan Konflik Sosial, Buku diterbitkaan UPT MKU Universitas Airlangga Surabaya, 2003
2. Manajemen Agribisnis, Buku diterbitkan UPNV Jawa Timur, 2005 (ISBN)
3. Manajemen Produksi Agribisnis, Buku diterbitkan UPNV Jawa Timur, 2005 (ISBN).
4. Kemiskinan: Teori Dan Aplikasinya Dalam Pendekatan Kualitatif. 2007 Buku (ISBN)

3. Penatar P-4 bagi mahasiswa baru PTN/PTS Surabaya, 1992-1997
4. Penatar P-4 bagi masyarakat umum di kelurahan se Surabaya, 1994-1997
5. Pengurus Ikatan Alumni UPN "Veteran" Jawa Timur sebagai Wakil Ketua Bidang Kerohanian, 2004-2008.
6. Wakil Ketua Yayasan Masjid Nurul Iman Wisma Lidah Kulon Sby, 2001-2002
7. Ta'mir Masjid Istiqomah UPN "Veteran" Jawa Timur, 2002-sekarang
8. Imam dan Khotib Sholat Jumat dan Sholat Idul Fitri / Adha pada beberapa Masjid di Surabaya dan Sidoarjo,1985-sekarang
9. Pembina Majelis Ta'lim AtTaubah Perumahan Taman Surya Agung Sidoarjo, 1998-sekarang
10. Penasehat Panitia Idul Adha Masjid Nurul Islam Perumahan Taman Surya Agung Sidoarjo, 2007-sekarang
11. Ketua RT 05 RW 05 Perumahan Taman Surya Agung 1997-2001
12. Wakil Ketua RW 06 Perumahan Taman Surya Agung 2001-2004
13. Komite Sekolah SMA Khadijah Surabaya 2008-2010
14. Instruktur Pelatihan Manajemen Usaha pada Agroindustri Gula Kelapa di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, 1996
15. Nara Sumber Acara Talk Show Radio Suara Mitra Surabaya, 14 April 2009, tentang Agroindustri: Peluang dan Tantangannya Menghadapi Era Global
16. Instruktur Pelatihan Manajemen Usahatani Tembakau, Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur, Hotel Utami, Sidoarjo, 11-14 Mei 2009

17. Round Table "Strategi Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan Petani" Perhepi- PPS UPNV Jatim, 23 Juni 2009
18. Seminar Lokakarya Reorientasi Siskamnas. UPNV Jatim, 28 Juli 2009.
19. Training of Trainers (TOT) Perbankan Syariah Bagi Dosen Perguruan Tinggi Se Indonesia. FE Universitas Airlangga Surabaya – Bank Indonesia, 18-20 Mei 2010.
20. Seminar Nasional Pengembangan Kawasan Agropolitan di Jawa Timur. Bapeda Propinsi Jawa Timur, 9 November 2010
21. Workshop "Enhancing Export Quality of Cocoa Products Using Indonesian National Standard (SNI)". Badan Standar Nasional- Pemprop Jawa Timur, 30 November 2010
22. Seminar Nasional Strategi Pengembangan Pisat-pusat Bisnis di Jawa Timur. 15 Desember 2010. Bappeda Propinsi Jawa Timur
23. Seminar Nasional Investigasi Beberapa Indikator MDGs di Jawa Timur, 16 Desember 2010. Bappeda Propinsi Jawa Timur.

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

1. Anggota Tim Perumusan "Nation and Character Building" untuk pembuatan Buku Pembangunan Jati Diri Bangsa. Pemprop Jawa Timur, DHD '45 Propinsi Jatim, dan 17 PTN/PTS di Jawa Timur, 2004-2005.
2. Anggota LP3 Jatim (Lembaga Pembudayaan Pancasila dan Pembangunan Masyarakat Jawa Timur), sekretariat Universitas Airlangga, Surabaya, 2003-sekr

9. Lokakarya Meningkatkan Penjaminan Mutu Melalui Pembuatan Dokumen. Badan Penjaminan Mutu UPNV Jatim, 21-22 Agustus 2007.
10. Seminar dan Lokakarya Nasional "Revitalisasi dan Restrukturisasi Pemberdayaan Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah". Induk Koperasi Pribumi Indonesia – Pascasarjana UPN "Veteran" Jawa Timur, 24 Oktober 2007.
11. Seminar Nasional "Metode Penelitian Desain Eksperimental: Aplikasi dalam Penelitian Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi. Program Magister Sains dan Doktor Ilmu-ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, 4-5 Desember 2007.
12. Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. LPPM UPN "Veteran" Jawa Timur, 16 Mei 2008
13. Seminar Internasional "The Technology of Long Span Bridge To Strenghten The Unity of Nation". Jurusan Teknik Sipil FTSP UPNV Jatim, 8-9 Juli 2008.
14. Workshop Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ekonomi. Fordes dan PPS UPN "Veteran" Jawa Timur, 3 Desember 2008.
15. Seminar Sehari "Kebangsaan Indonesia: Mengurai Jati Diri. LP3 Jatim-LPPM Universitas Airlangga Surabaya, 14 Januari 2009.
16. Seminar Nasional "Peningkatan Produktivitas Melalui Sumber Daya Lokal" FP UWK, Surabaya, 17 Maret 2009.

Merancang Usaha Dan Peningkatan Jiwa Kewirausahaan. 16 Desember 2010

KURSUS/LOKAKARYA/SEMINAR:

1. Kursus Calon Dosen Kewiraan Angkatan XXXIX, tanggal 13 Januari s/d 7 Maret 1997 di LEMHANNAS, Jakarta.
2. Seminar Internasional "Strategic Management". Universitas Brawijaya, Malang, 16 Juni 2005
3. Seminar Internasional "Urban Development". Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 5 Agustus 2005.
4. Lokakarya Pengembangan Metode Pembelajaran, Program Hibah Kompetisi A-1 Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian UPNV Jatim, 11 Mei 2006.
5. Lokakarya Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu, Program Hibah Kompetisi A-1 Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian UPNV Jatim, 12 Mei 2006.
6. Focus Group Discussion Pengembangan Standard Operational Procedure Manajemen Laboratorium. FP UPNV Jatim, 21 Juni 2006.
7. Lokakarya Nasional dan Temu Bisnis: Implementasi Pengembangan dan Bisnis Jarak Pagar Sebagai Biofuel. IMA Jatim-UPNV Jatim, 28 November 2006
8. Seminar Nasional "Kebangkitan Penyuluhan Dan Komunikasi Pembangunan: Realita Dan Harapan". Sekolah Pascasarjana UGM – Dinas Pertanian Propinsi DIY, Jogjakarta, 14 Desember 2006.

untuk mencurahkan perhatian kepada ibadah, asalkan juga selalu memperhatikan iman dan takwa. Hankam akan lebih tangguh karena masyarakat yang lebih kaya juga akan mampu membina kekuatan hankam, termasuk kepolisian, yang lebih mampu menjalankan fungsinya.

PEMBANGUNAN PERTANIAN (AGRIBISNIS) – KETAHANAN NASIONAL

Pemerintah telah bekerja keras untuk membangun sektor pertanian sebagai bagian dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Berbagai pendekatan pembangunan sektor pertanian telah dicoba seperti pembangunan pertanian terpadu, pembangunan pertanian berwawasan lingkungan, dan pembangunan pertanian berwawasan agribisnis. Kalau diperhatikan segenap upaya tersebut sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperbesar angka penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi angka kemiskinan. Pembangunan agribisnis akan meningkatkan ketahanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, distribusi, diversifikasi) baik pada skala rumah tangga, wilayah, regional, maupun ketahanan pangan tingkat nasional. Hal tersebut akan berpengaruh pada ketahanan bidang ekonomi dalam arti pertumbuhan ekonomi meningkat dan selanjutnya akan berdampak pada makin tingginya ketahanan nasional.

Namun demikian karena ketahanan nasional bersifat dinamis, maka upaya pemenuhan pangan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan harus terus diusahakan secara sistematis, dan berkelanjutan. Banyak program pemerintah baik pada masyarakat miskin perdesaan maupun perkotaan kurang terintegrasi, sarat akan berbagai kepentingan dan yang lebih parah program

usaha kecil dan menengah juga merupakan pertahanan terpenting untuk menghadapi masuknya barang dari luar. Lapisan usaha kecil dan menengah itu dapat disamakan satu pertahanan territorial dalam bidang ekonomi nasional.

Karena itu usaha rakyat bersama pemerintah untuk membangun usaha kecil dan menengah dalam jumlah besar serta bermutu tinggi mempunyai dua manfaat sekaligus. Di satu pihak akan mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat yang miskin. Di pihak lain diwujudkan sarana untuk menghadapi masalah penyediaan kesempatan kerja serta pertahanan terhadap dominasi produksi luar negeri.

Melalui proses itu kemiskinan akan makin hilang dari masyarakat Indonesia. Dan yang akan terbentuk adalah satu masyarakat yang terutama terdiri dari golongan menengah. Kondisi demikian merupakan keadaan yang paling baik bagi terwujudnya Ketahanan Nasional yang andal. Sebab dampaknya akan terasa di segala aspek kehidupan bangsa, baik dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama dan hankam. Ideologi Pancasila akan lebih mantap sebagai pedoman kehidupan karena orang melihat dan merasakan kemajuan dalam kehidupan yang menganut Pancasila. Kondisi politik akan lebih mantap, karena masyarakat yang baik penghasilannya cenderung lebih baik menjalankan sistem demokrasi Pancasila. Ekonomi nasional akan menjadi lebih kuat, baik secara absolut dengan penghasilan per kapita lebih tinggi maupun secara relatif dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Keadaan sosial pun makin baik, pengangguran akan jauh berkurang dan orang miskin makin berkurang. Kondisi kehidupan beragama akan lebih bermutu karena masyarakat akan mempunyai kesempatan lebih banyak

Sumberdaya Manusia Indonesia Khususnya di Bidang Pertanian. Fakultas pertanian UPN "Veteran" Jogjakarta, 2-3 September 2002. Judul makalah: "Pengembangan Sumberdaya Manusia, Salah satu Upaya Peningkatan Kinerja Sistem Agribisnis".

4. Seminar Nasional, 14 Mei 2005. Faperta UPN "Veteran" Jawa Timur. Judul makalah: "Pembangunan Ekonomi Pedesaan: Suatu Implikasi Revitalisasi Pembangunan Pertanian".
5. Seminar Nasional, 18 Mei 2006. Faperta UPN "Veteran" Jawa Timur. Judul makalah: "Pembangunan Perkotaan Berbasis Lingkungan Hidup Menuju Terciptanya "Green City".
6. Seminar Akademik Program Studi Manajemen Agribisnis Fakultas Pertanian UPNV Jawa Timur, 12 Desember 2007. Judul makalah: "Diskursus Penelitian Dalam Perspektif Ideografik Dan Postmodernisme".
7. Seminar Nasional Fakultas Pertanian UPNV Jawa Timur, 7 Juli 2008. Judul makalah: "Pemberdayaan Petani Menuju Kedaulatan Pangan Nasional".
8. Seminar Nasional Rotan Komoditas Hasil Hutan Non Kayu, 13 Desember 2010, Judul makalah : "Rotan: Komoditas Menjanjikan". Balai Pengelolaan Hutan Wilayah VII Kementerian Kehutanan Di Jawa Timur
9. Lokakarya Sasaran Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Jawa Timur, 14 Desember 2010. Bappeda Propinsi Jawa Timur
10. Seminar Hasil-hasil penelitian oleh LPPM UPNV Jawa Timur. Skim hibah DP2M Dikti (iBM) Judul: Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pelatihan

9. Jurnal Agritek Vol.14 Juli 2005 IPM Malang (TERAKREDITASI). "Kajian Motivasi Juru Periksa Daging (Studi Kasus Pada Rumah Potong Hewan Kota Surabaya)".
10. Jurnal Ilmu Pertanian "Mapeta" Fakultas Pertanian UPNV Jatim Vol 8 No 1, Desember 2005. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Cengkeh Di Jawa Timur".
11. Jurnal penelitian Ilmu-ilmu Pertanian LPPM UPNV Jatim Vol 3 No 2, Desember. "Analisis Nilai Tambah Dan Harga Pokok Penjualan Mete Dengan pendekatan Akuntansi".
12. Jurnal Ilmu Pertanian "Mapeta" Fakultas Pertanian UPNV Jatim Vol 7 No 1, Desember 2004. "Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Rokok "X" Di Kabupaten Tulungagung".

PEMAKALAH:

1. Simposium Hortikultura Nasional, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, 8-9 November 1994. Judul Makalah: "Ekspor Hortikultura Indonesia: Peluang, Kendala, Dan Alternatif Pemecahannya".
2. Seminar Nasional "Pemanfaatan Sumberdaya lokal Untuk Pembangunan Pertanian Berkelanjutan" Universitas Wangsa Manggala, Jogjakarta, 2 Oktober 2001.Judul makalah: "Kajian Asuransi Pertanian Dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis".
3. Lokakarya Nasional 2002: Masalah Kesiapan Indonesia Menghadapi Pemberlakuan AFTA 2003: Suatu Tinjauan Terhadap Peluang dan Tantangan

JURNAL:

1. Jurnal Saintek Kopertis Wilayah VII Vol.6 No.1, Juni 2009. "Pewilayahan Komoditas Kedelai Dalam Mendukung Kegiatan Agroindustri Di Kab Sidoarjo".
2. Jurnal of Business and Management "Eksekutif" IBMT (TERAKREDITASI) Vol.6. No.2 Juni 2009. "Strategi Pemasaran Produk French Fried".
3. Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis FE UPN "Veteran" Jawa Timur Vol.8 No.2 September 2008. "Penilaian Konsumen Terhadap Beberapa Atribut Dua Jenis Rokok Produk Sampoerna".
4. Jurnal Agritek Vol.17 Juli 2008 IPM Malang (TERAKREDITASI). "Keragaan Benih Bersertifikat Padi Di Kabupaten Ponorogo".
5. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian FP Unej Jember Vol.2 No.1 Maret 2008. "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Volume Penjualan Produk Olahan Kentang "French Fried".
6. Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Malang Edisi Khusus, September 2008 (TERAKREDITASI). "Kemiskinan Dalam Perspektif Masyarakat Desa Tertinggal Di Kabupaten Sampang".
7. Jurnal Ilmu Pertanian "Mapeta" Fakultas Pertanian UPNV Jatim Vol.10 No.1 Desember 2007. "Dampak Lumpur Lapindo Sidoarjo Pada Sektor Pertanian".
8. Jurnal Ilmu Pertanian "Mapeta" Fakultas Pertanian UPNV Jatim Volume 8 N0 2, April 2006. "Analisis Strategi Pengembangan Produk Tepung Terigu PT ISM Flour Mills Surabaya".

PENELITIAN:

1. Partisipasi, Peranan Wanita dalam Agribisnis Perdesaan, (Balitbang Jatim, 2002)
2. Agribisnis Kayu Jati (DP2M Dikti Depdiknas, 2004)
3. Pola Manajemen Sarana Produksi Pertanian Dalam Sistem Informasi Manajemen Agribisnis Terpadu Produk Unggulan Hortikultura Di Jawa Timur, (Balitbang Propinsi Jawa Timur, 2006).
4. Strategi Pemasaran Produk Unggulan Tanaman Hortikultura dan Industri Di Kabupaten Ngawi (Balitbangda Kabupaten Ngawi, 2006)
5. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Malang (Balitbang Malang, 2006)
6. Kemiskinan Dalam Perspektif Masyarakat Desa Tertinggal Di Kabupaten Sampang (DP2M Dikti Depdiknas, 2007)
7. Roadmap Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gresik (Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2007)
8. Studi Kemiskinan Dalam Perspektif Masyarakat Religius (DP2M Dikti, 2008)
9. Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Propinsi Jawa Timur (Bappeda Prop Jatim, 2009, Konsultan/Tenaga Ahli)
10. Investigasi Beberapa Indikator Tujuan Pembangunan Milenium Di Propinsi Jawa Timur (Bappeda Prop Jatim, 2010, Konsultan/Tenaga Ahli)
11. Strategi Pengembangan Pusat-pusat Bisnis Di Propinsi Jawa Timur (Bappeda Prop Jatim, 2010, Konsultan/Tenaga Ahli)

4. Penata Muda Tk.I, Gol III / B Skep Menhankam No: Skep/2174/VIII/1993 tanggal 16 Agustus 1993 TMT 1 April 1993
5. Penata, Gol III / C, Skep Menhankam No: Skep/1172/VIII/1997 tanggal 13 Agustus 1997 TMT 1 April 1997
6. Penata Tk.I , Gol. III / D, Skep Menhan No: Skep/767/IX/2001 tanggal 19 September 2001 TMT 1 April 2001
7. Pembina, Gol. IV / A, Skep Menhan No: Skep/143/M/III/2005 tanggal 9 Maret 2005 TMT 1 April 2005
8. Pembina Tk.I, Gol IV / B, Kep Menhan No: Kep/54/M/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 TMT 1 April 2009

JABATAN FUNGSIONAL:

1. Asisten Ahli Madya, TMT 1 Juni 1991 (Mendikbud No:1673/D/C/1991)
2. Asisten Ahli, TMT 1 Desember 1995 (Mendikbud No:3497/D/C/1995)
3. Lektor Muda, TMT 1 Desember 1997 (Mendikbud No:3060/D/C/1997)
4. Lektor Madya, TMT 31 Desember 2000 (Mendiknas No:5891/D/C/2000)
5. Lektor Kepala, TMT 1 Desember 2004 (Mendiknas No:43447/A2.7/KP/2004)
6. Profesor/Guru Besar, TMT 1 September 2010 (Mendiknas No:74923/A4.5/KP/2010)

PEKERJAAN/JABATAN:

1. Asisten Dosen FP UPN "Veteran" Jawa Timur, 1988-1989
2. Kasie Lab. Konservasi Tanah FP UPN "Veteran" Jawa Timur, 1989-1992
3. Kabid Renpusprog SDM LPM UPN "Veteran" Jawa Timur, 1994-1997
4. Kabag Humas UPN "Veteran" Jawa Timur, 1997-2001
5. Dosen FP – Sosek UPN "Veteran" Jawa Timur, 2001-2004
6. Anggota Senat Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Jawa Timur, 2001-2004
7. Anggota Senat Universitas UPN "Veteran" Jawa Timur, 2001-2004
8. Kaprogdi Magister Manajemen Agribisnis PPS UPN Jatim, 2007- 2008
9. Dosen Fakultas Pertanian (S1) 1989-sekr; dan Program Pascasarjana (S2) Magister Manajemen Agribisnis UPN "Veteran" Jawa Timur, 1999-sekr.

KEPANGKATAN STRUKTURAL SEBAGAI PNS DEPHAN (KEMHAN)

1. Asisten Dosen, Skep Rektor UPN "Veteran" Pusat Jogjakarta No: Skep/125/XII/1988 tanggal 31 Desember 1988
2. Capeg, Skep Menhankam No: Skep/927/V/1989 tgl 26 Mei 1989 TMT 1-3-1989
3. Penata Muda, Gol III / A Skep Menhankam No:Skep/896/V/1990 tgl 18 Mei 1990 TMT 1 Juni 1990

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: PROF.DR.Ir.H.SYARIF IMAM HIDAYAT,MM
Tempat tgl Lahir	: Sumenep, 18 Februari 1963
Pangkat / NIP	: Pembina TK I Gol.IV B NIP 19630218 198903 1002
Pekerjaan	: Dosen Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Jawa Timur
Jabatan Fungsional	: Guru Besar
Agama	: Islam
Status	: Kawin

Status	: Kawin
Isteri	: Dra.Hj.LITA JOERINAWATI
Anak Kandung	: WARDATUNNISA FIRDAUS AZIZAH (18 th) FAHMI HAIDAR HIDAYAT (14 th) ABDILLAH MUHAMMAD NAQSYABANDI (4 th)
Nama Ayah	: H. RADEN PANJI ABDUR RASYID (alm)
Nama Ibu	: Hj. RADEN AYU MUNIRA (79 th)
Alamat	: Taman Surya Agung N – 5 Wage, Sidoarjo 61257
Organisasi Profesi	: PMAI, PERHEPI, ISI, HITI

PENDIDIKAN:

1. SD Negeri Karembangan I Sumenep, 1968-1974 (pelajar teladan)
2. SMP Negeri Sumenep, 1974-1977 (lulusan sekolah terbaik ke 2)
3. SMA Negeri Sumenep, 1977-1981 (10 besar terbaik kelas)
4. S-1 Fakultas Pertanian, UPN "Veteran" Jawa Timur, 1982-1987 (IPK 3,11)
5. S-2 Magister Manajemen Agribisnis PPS IPB – Bogor, 1992-1994 (IPK 3,48)
6. S-3 Program Doktor Ilmu Pertanian (Sosped) PPS Unibraw, Malang, 2004-2007 (Cumlaude, IPK 3,97)
7. Suscadoswir Angkatan XXXIX / 1997 Lemhannas Jakarta
8. Lulus Sertifikasi Dosen Sebagai Dosen Profesional, 2008.

Yudhoyono, S.B. 2004. Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran: Analisis Ekonomi-Politik Kebijakan Fiskal. Disertasi. Sekolah Pascasarjana, IPB, Bogor.

Mosher, A.T. 1976. *Getting Agriculture Moving and Creating a Progressive Rural Structure.* Published by Preager, New York.

Nugroho, H. 1995. Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan. Dalam Awan (ed), Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia. Aditya Media, Jogjakarta.

OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights). 2002. *Draft Guidelines: A Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies.* United Nations. Geneva, Switzerland.

Pasaribu, B. 2006. *Poverty profile and the alleviation programs in Indonesia.* Paper presented in Asian Regional Seminar on Poverty Alleviation, held by AFPPD and IFAD, 5-6 April 2006. Hanoi, Vietnam.

Sahdan, G. 2005. Menanggulangi Kemiskinan Desa. Jurnal Ekonomi Rakyat. www.ekonomirakyat.org.

Saragih, B. 1998. Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. Percetakan Nasional, Jakarta.

Sayidiman. 1995. Kemiskinan Melemahkan Ketahanan Nasional

Scott, J. 1987. Moralitas Ekonomi Petani. LP3ES, Jakarta.

Sumodiningrat, G. 1999. Butir-butir Pemikiran Strategi Menghapus Kemiskinan. Dalam Hasan Basri (ed), Pembangunan Ekonomi Rakyat di Perdesaan. PT Bina Rena Pariwara, Jakarta.

Tambunan,T. 2001. Perekonomian Indonesia. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wiranto. 2009. Pembangunan Pertanian Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. Makalah Seminar 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional "Dekonstruksi Politik Pertanian Menjelang 2009". IPB Bogor, 28 Mei 2008.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, B. 2004. Dekomposisi Pertumbuhan Pertanian Indonesia. Makalah pada Seminar Khusus Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

Bappenas. 2005. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) di Indonesia

_____. 2009. Data Jumlah Angka Kemiskinan Di Indonesia

BPS. 2010. Jumlah Penduduk Miskin.

Darwin, M. 2005. Memanusiakan rakyat: Penanggulangan Kemiskinan Sebagai arus Utama Pembangunan. Penerbit Benang Merah, Jogjakarta.

Dewanta, A.S. 1995. Kemiskinan dan Kesenjangan Di Indonesia. Aditya Media, Jogjakarta

Hidayat SI. 2007. Studi Kemiskinan Dalam Perspektif Masyarakat Miskin Desa Tertinggal Di Kabupaten Sampang. Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika Universitas Merdeka Malang (terakreditasi). Volume 6 edisi khusus, September. ISSN 1693-6604.

_____. 2008. Kemiskinan Dalam Masyarakat Religius. Laporan Penelitian Fundamental DP2M Dikti.

ISSC. 1992. Comparative Research Programme on Poverty. CROP.

LPEM-FE-UI. 2004. Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi Yang Memihak Kelompok Miskin Di Indonesia. Jakarta.

Meier, G.M. 1989. *Leading Issues in Economic Development.* Oxford University Press, New York